

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

A. GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

1. Profil Provinsi Riau

Provinsi Riau adalah salah satu dari 33 Provinsi di wilayah Indonesia yang terletak di pulau Sumatera. Hingga tahun 2014, provinsi Riau ini meliputi Kepulauan Riau, sekelompok dari pulau-pulau kecil (pulau-pulau utamanya antara lain Pulau Batam dan Pulau Bintan) yang terletak disebelah timur Sumatera dan sebelah selatan Singapura.

Kepulauan ini dimekarkan menjadi provinsi tersendiri pada bulan Juli 2004. Ibu kota dan kota terbesar Provinsi Riau adalah Pekanbaru. Kota besar lainnya antara lain Dumai, Selatpanjang, Bagansiapiapi, Bengkalis, Bakinang, Tembilahan dan Rengat.

Provinsi Riau berbatasan disebelah utara dengan selat Singapura dan selat malaka, disebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi dan selat berhala, sebelah timur berbatasan dengan laut cina selatan (Kepulauan Riau) dan disebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatra Barat dan Sumatra Utara.

Letak, luas dan batas wilayah administrasi Provinsi Riau adalah sebagai berikut luas wilayahnya sebesar 8.915.015,09 Ha (luas sesudah pemekaran dengan Provinsi Kepulauan Riau) keberadaan batas wilayahnya membentang dari lereng Bukit Barisan sampai laut cina

selatan terletak antara 1°15' Lintang selatan sampai 4°45' lintang utara atau antara 03°- 104°19' Bujur timur dan 6°50'-14°5' bujur barat dan secara administratif pemerintah wilayah provinsi Riau terdiri dari 12 Kabupaten dan Kota.



Gambar 4. 1

Peta wilayah administrasi Provinsi Riau

(Sumber BPS Provinsi Riau, 2012)

Dilihat dari Gambar 4.1 letak batas-batas wilayah provinsi Riau berbatasan dengan provinsi-provinsi lain nya di pulau sumatera. Pada gambar 4.1 bisa kita lihat letak wilayah provinsi riau dimana pada provinsi Riau terdiri dari beberapa kota dan kabupaten. Berikut 12 kabupaten dan kota diprovinsi riau beserta luas wilayah beserta ibukota kabupaten/kota.

Tabel 4. 1
Luas Wilayah Masing-Masing Kabupaten dan
Kota di Provinsi Riau

No.	Kabupaten/kota	Ibu Kota Kabupaten	Luas (Ha)
1.	Kuantan Singingi	Taluk Kuantan	520.216
2.	Indragiri Hulu	Rengat	767.627
3.	Indragiri Hilir	Tembilahan	1.379.837
4.	Pelalawan	Pangkalan Kerinci	1.240.414
5.	Siak	Siak Sri Indrapura	823.357
6.	Kampar	Bakinang	1.092.820
7.	Rokan Hulu	Pasir Pangarayan	722.978
8.	Rokan Hilir	Bagan Siapi-api	896.143
9.	Kepulauan Meranti	Selat Panjang	360.703
10.	Bengkalis	Bengkalis	843.720
11.	Pekanbaru	Pekanbaru	63.301
12.	Dumai	Dumai	203.900
Jumlah			8.915.016

Sumber: BPS Provinsi Riau (2012)

B. Gambaran Umum Variabel Operasional

1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu cara alat ukur untuk melihat kondisi perekonomian atau menjadi alat ukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari satu periode ke periode berikutnya pada suatu wilayah tertentu.

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau adalah proses perubahan kondisi perubahan perekonomian secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik yang dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam suatu periode tertentu. Antara lain faktor yang mempengaruhi adalah tingkat investasi, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah. Berikut adalah nilai pertumbuhan ekonomi di provinsi Riau pada tahun 2013-2017.

Tabel 4. 2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau periode
2013-2017

No.	Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (Persen)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Kuantan Singingi	5.47	5.14	-2.14	3.88	4.15
2.	Indragiri Hulu	6.21	5.53	-2.94	3.68	5.45
3.	Indragiri Hilir	7.17	6.88	2.04	4.84	8.59
4.	Pelalawan	5.55	6.2	2.46	2.96	6.17
5.	Siak	-2.33	-0.97	-0.21	0.35	11.19
6.	Kampar	6.31	3.43	1.09	2.8	10.06
7.	Rokan Hulu	5.99	6.5	1.98	4.94	4.36
8.	Bengkalis	-3.27	-3.85	-2.74	-2.44	18.7
9.	Rokan Hilir	2.38	4.81	0.52	2.3	10.48
10.	Kepulauan Meranti	4.24	4.45	2.85	3.22	2.35
11.	Pekanbaru	5.59	6.9	5.57	5.96	14.25
12.	Dumai	3.68	2.69	1.91	4.64	4.26
	Rata-Rata	2.48	2.71	0.22	2.23	8.33

Sumber : Badan Pusat Statistik Riau 2018

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dilihat laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau selama periode 2013-2017 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu dari 2.48 tahun 2013 menjadi 2.23 persen pada tahun 2016. Tetapi pada tahun 2017 mengalami peningkatan yang sangat drastis dari 2.23 pada tahun 2016 menjadi 8,33 persen pada tahun 2017. Nilai laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu 0.22 persen dan nilai laju pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 8.33 persen.

Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 angka tertingginya terjadi di daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 7.17 persen sedangkan nilai laju pertumbuhan ekonomi terendah terjadi di daerah kabupaten Bengkalis sebesar -3.27 persen.

Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 angka tertingginya terjadi di daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 6.88 persen sedangkan nilai laju pertumbuhan ekonomi terendah terjadi di daerah kabupaten Siak sebesar -0.97 persen.

Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 angka tertingginya terjadi di daerah Kota Pekanbaru sebesar 5.57 persen sedangkan nilai laju pertumbuhan ekonomi terendah terjadi di daerah kabupaten Indragiri Hulu sebesar -2.94 persen.

Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 angka tertingginya terjadi di daerah Kota Pekanbaru sebesar 5.96 persen sedangkan nilai laju pertumbuhan ekonomi terendah terjadi di daerah kabupaten Bengkalis sebesar -2.44 persen.

Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 angka tertingginya terjadi di daerah Kabupaten Bengkalis sebesar 18.7 persen sedangkan nilai laju pertumbuhan ekonomi terendah terjadi di daerah kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 2.35 persen.

2. Tenaga Kerja

Jumlah penduduk yang besar maka jumlah tenaga kerja yang tersedia juga besar. Tenaga kerja adalah salah satu faktor yang positif dalam pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang besar berarti akan menambah tingkat nilai produksi, Sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar ukuran pasar domestiknya juga lebih besar dan jumlah penduduk yang besar berarti tenaga kerja yang tersedia juga semakin

besar juga. Dengan ketersediaan tenaga kerja yang melimpah maka ini yang akan berpengaruh terhadap tingkat output dalam perekonomian. Semakin banyak jumlah penduduk maka akan semakin banyak barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian.

Selain itu tingkat jumlah penduduk yang besar juga akan mempengaruhi luas pasar yang akan menampung barang dan jasa yang dihasilkan hal tersebut selanjutnya akan mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi. Namun pertumbuhan penduduk yang besar harus diimbangi dengan dengan kualitas penduduknya. Tingkat angka tenaga kerja di provinsi Riau pada tahun 2013-2017 bisa kita lihat pada tabel 4.3 berikut :

Tabel 4. 3
Tingkat Jumlah Tenaga Kerja di Provinsi Riau Pada
Tahun 2013-2017

No.	Kabupaten/Kota	Tingkat angka tenaga kerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Kuantan Singingi	138.493	129.046	145.475	137.671	136.763
2.	Indragiri Hulu	162.967	168.100	181.070	170.712	192.792
3.	Indragiri Hilir	323.759	279.889	295.451	299.700	208.078
4.	Pelalawan	153.227	172.931	161.724	162.627	197.445
5.	Siak	161.533	168.808	160.456	163.599	196.749
6.	Kampar	302.242	308.617	294.638	301.832	328.160
7.	Rokan Hulu	204.133	220.354	238.412	220.966	262.265
8.	Bengkalis	201.774	238.979	218.898	219.884	225.043
9.	Rokan Hilir	409.711	426.581	420.009	451.913	443.276
10.	Kepulauan Meranti	138.654	144.959	142.449	148.909	127.336
11.	Pekanbaru	422.254	408.331	440.873	423.820	467.555
12.	Dumai	108.704	114.066	117.280	288.233	123.550

Sumber : BPS Riau (2018)

Berdasarkan Tabel 4.3 diatas dapat dilihat tingkat tenaga kerja Provinsi Riau pada tahun 2013-2017. Dari tabel 4.3 diatas bisaa dilihat jumlah angka tenaga kerja yang berada di provinsi Riau selalu berubah setiap tahun nya. Pada tahun 2013 angka tenaga kerja yang berada di

kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 138.493 juta jiwa pada tahun 2014 mengalami kenaikan jumlah tenaga kerja menjadi 129.409 juta jiwa tetapi pada tahun 2015 mengalami kenaikan jumlah tenaga kerja menjadi 145.475 juta jiwa pada tahun 2016 mengalami penurunan jumlah tenaga kerja menjadi 137.671 juta jiwa, ditahun 2017 mengalami penurunan sedikit jumlah tenaga kerja menjadi 136.763 juta jiwa.

Daerah kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2013 jumlah angka tenaga kerja sebanyak 162.967 juta jiwa pada tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi 168.100 juta jiwa tetapi pada tahun 2015 kembali mengalami kenaikan jumlah tenaga kerja menjadi 181.070 juta jiwa pada tahun 2016 juga mengalami penurunan jumlah tenaga kerja kembali menjadi 170.712 juta jiwa ditahun 2017 mengalami kenaikan jumlah tenaga kerja menjadi 192.792 juta jiwa.

Daerah kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2013 jumlah angka tenaga kerja sebanyak 323.759 juta jiwa pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 279.889 juta jiwa pada tahun 2015 mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja menjadi 295.451 juta jiwa pada tahun 2016 mengalami kenaikan jumlah tenaga kerja menjadi 299.700 juta jiwa ditahun 2017 mengalami penurunan jumlah tenaga kerja menjadi 208.078 juta jiwa.

Daerah kabupaten Pelalawan pada tahun 2013 jumlah angka tenaga kerja sebanyak 153.227 juta jiwa pada tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi 172.931 juta jiwa pada tahun 2015 mengalami penurunan jumlah

tenaga kerja menjadi 161.724 juta jiwa pada tahun 2016 mengalami kenaikan jumlah tenaga kerja menjadi 162.627 juta jiwa ditahun 2017 mengalami kenaikan kembali jumlah tenaga kerja menjadi 194.445 juta jiwa.

Daerah kabupaten Kampar pada tahun 2013 jumlah angka tenaga kerja sebanyak 302.242 juta jiwa pada tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi 308.617 juta jiwa pada tahun 2015 mengalami penurunan jumlah tenaga kerja menjadi 294.638 juta jiwa pada tahun 2016 mengalami kenaikan jumlah tenaga kerja menjadi 301.832 juta jiwa ditahun 2017 mengalami kenaikan kembali jumlah tenaga kerja menjadi 328.160 juta jiwa.

Daerah kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2013 jumlah angka tenaga kerja sebanyak 204.133 juta jiwa pada tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi 220.354 juta jiwa pada tahun 2015 mengalami kenaikan jumlah tenaga kerja menjadi 238.412 juta jiwa pada tahun 2016 mengalami penurunan jumlah tenaga kerja menjadi 220.966 juta jiwa ditahun 2017 mengalami kenaikan jumlah tenaga kerja menjadi 435.193,55 juta jiwa.

Daerah kabupaten Bengkalis pada tahun 2013 jumlah angka tenaga kerja sebanyak 201.774 juta jiwa pada tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi 238.979 juta jiwa pada tahun 2015 mengalami penurunan jumlah tenaga kerja menjadi 218.898 juta jiwa pada tahun 2016 mengalami kenaikan jumlah tenaga kerja menjadi 219.884 juta jiwa ditahun 2017 mengalami kenaikan jumlah tenaga kerja menjadi 225.043 juta jiwa.

Daerah kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2013 jumlah angka tenaga kerja sebanyak 409.711 juta jiwa pada tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi 426.581 juta jiwa pada tahun 2015 mengalami penurunan jumlah tenaga kerja menjadi 420.009 juta jiwa pada tahun 2016 mengalami kenaikan jumlah tenaga kerja menjadi 451.913 juta jiwa ditahun 2017 mengalami penurunan jumlah tenaga kerja menjadi 443.276 juta jiwa

Daerah kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2013 jumlah angka tenaga kerja sebanyak 138.449 juta jiwa pada tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi 144.959 juta jiwa pada tahun 2015 mengalami penurunan jumlah tenaga kerja menjadi 142.449 juta jiwa pada tahun 2016 mengalami kenaikan jumlah tenaga kerja menjadi 148.900 juta jiwa ditahun 2017 mengalami penurunan jumlah tenaga kerja menjadi 127.336 juta jiwa

Daerah Kota Pekanbaru pada tahun 2013 jumlah angka tenaga kerja sebanyak 422.254 juta jiwa pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 408.331 juta jiwa pada tahun 2015 mengalami kenaikan jumlah tenaga kerja menjadi 440.873 juta jiwa pada tahun 2016 mengalami penurunan jumlah tenaga kerja menjadi 423.820 juta jiwa ditahun 2017 mengalami kenaikan jumlah tenaga kerja menjadi 467.555 juta jiwa.

Daerah Kota Dumai pada tahun 2013 jumlah angka tenaga kerja sebanyak 108.704 juta jiwa pada tahun 2014 mengalami kenaikan jumlah tenaga kerja menjadi 114.066 juta jiwa pada tahun 2015 mengalami kenaikan jumlah tenaga kerja menjadi 117.280 juta jiwa pada tahun 2016

mengalami kenaikan jumlah tenaga kerja menjadi 288.233 juta jiwa ditahun 2017 mengalami penurunan jumlah tenaga kerja menjadi 123.550 juta jiwa.

3. Pengeluaran Pemerintah

Menurut Guritno (2019), pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus di keluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Selain tenaga kerja yang merupakan faktor pendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah terdapat satu faktor lain yang tidak kalah penting yaitu peran serta pemerintah. Peran pemerintah sangat penting untuk mengatur kegiatan ekonomi, mengendalikan kestabilan ekonomi serta meningkatkan perekonomian daerahnya. Pendapatan yang diperoleh pemerintah dialokasikan untuk pembiayaan dalam bentuk pengeluaran pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran maupun penerimaan pemerintah ini diatur melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja pemerintah Daerah (APBD).

Realisasi pendapatan maupun belanja pemerintah Provinsi Riau terus meningkat setiap tahunnya. Pendapatan yang diperoleh pemerintah dialokasikan untuk pembiayaan dalam bentuk pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran langsung maupun pengeluaran tidak langsung.

Pengeluaran pemerintah tersebut mampu memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel 4. 4

PDRB Kabupaten/Kota Menurut Pengeluaran Pemerintah Provinsi Riau Pada Tahun 2013-2017 (milyar Rupiah)

No.	Kabupaten /Kota	Pengeluaran Pemerintah (milyar rupiah)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Kuantan Singingi	21.476,72	24.021,74	25.194,88	27.520,61	29.517,01
2.	Indragiri Hulu	29.872,28	33.765,48	34.583,59	37.031,2	38.738,28
3.	Indragiri Hilir	41.437,78	47.821,68	51.800,09	57.385,16	610.76,64
4.	Pelalawan	31.018,73	35.401,16	38.176,43	41.165,59	43.862,11
5.	Siak	82.129,72	85.735,52	772.357	78.943,5	79.613,19
6.	Kampar	61.515,51	68.816,91	66.285,16	69.674,66	71.589,98
7.	Rokan Hulu	21.645,41	25.355,42	26.907,16	29.130,67	31.037,81
8.	Bengkalis	156.624,44	165.899,04	135.504,92	132.314,26	133.035,53
9.	RokanHilir	63.200,09	74.545,55	70692,97	73.359,6	74.551,55
10.	Kepulauan Meranti	13.100,96	15.127,12	15.151,63	16.044,43	16.731,42
11.	Pekanbaru	60.492,46	73.841,22	83.663,98	92.380,25	101.343,86
12.	Dumai	21.231,77	23.628,46	25.453,57	27.975,39	35.304,35

Sumber : Badan Pusat Statistik Riau 2018

Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat dilihat jumlah pengeluaran pemerintah per kabupaten atau kota yang berada di Provinsi Riau pada tahun 2013-2017. Pengeluaran pemerintah provinsi Riau mengalami kenaikan yang fluktuatif dapat dilihat pengeluaran pada tahun 2013 sebesar 607.498.449,77 milyar rupiah dan pada tahun 2017 sebesar 705.678.594,41 milyar rupiah yang artinya selama 5 tahun provinsi Riau mengalami peningkatan sebanyak 98.180.144,64 milyar rupiah. Pada tahun 2013 daerah di provinsi Riau yang mempunyai pengeluaran pemerintah terbanyak terjadi di daerah kabupaten bengkalis sebesar

156.624,44 miliar rupiah sedangkan pengeluaran terkecil terjadi pada daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 13.100,96 miliar rupiah. Pada tahun 2014 daerah di provinsi Riau yang mempunyai pengeluaran pemerintah terbanyak terjadi di daerah yang sama kabupaten Bengkalis sebesar 165.899,04 miliar rupiah sedangkan pengeluaran terkecil terjadi pada daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar miliar rupiah 15.127,12 miliar rupiah, Pada tahun 2015 daerah di provinsi Riau yang mempunyai pengeluaran pemerintah terbanyak terjadi di daerah yaitu kabupaten Siak sebesar 772.357 miliar rupiah sedangkan pengeluaran terkecil terjadi pada daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar miliar rupiah 15.151,63 miliar rupiah.

Pada tahun 2016 daerah di provinsi Riau yang mempunyai pengeluaran pemerintah terbanyak terjadi di daerah kabupaten Bengkalis sebesar 132.314,26 miliar rupiah sedangkan pengeluaran terkecil terjadi pada daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 16.044,43 miliar rupiah miliar rupiah, Pada tahun 2017 daerah di provinsi Riau yang mempunyai pengeluaran pemerintah terbanyak terjadi di daerah kabupaten Indragiri Hilir sebesar 610.76,64 miliar rupiah sedangkan pengeluaran terkecil terjadi pada daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 16.731,42 miliar rupiah miliar rupiah, disisi lain dapat diartikan tingkat pengeluaran daerah pada kabupaten/kota di provinsi Riau yang mempunyai nilai terbanyak pengeluarannya terjadi di daerah yang beda pada setiap tahunnya.

4. Investasi

Faktor lain yang juga mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi daerah adalah investasi. Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pengeluaran penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian (Sukirno, 2012).

Bentuk investasi umumnya dibedakan menjadi dua macam yaitu investasi yang dilakukan oleh pemerintah/swasta dan investasi yang dilakukan oleh pihak luar negeri atau biasa dikenal dengan sebutan Penanaman modal asing (PMA).

Di tabel 4.5 bisa kita lihat angka investasi PMDN/PMA di wilayah-wilayah pada provinsi Riau pada tahun 2013-2017.

Tabel 4. 5

RealisasiInvestasi PMDN/PMA Privinsi Riau Pada Tahun
2013-2017 (Miliar Rupiah)

No	Kabupaten/ Kota	Investasi				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Kuantan Singingi	99,05	798,72	269,05	16.813,94	33.919,99
2.	Indragiri Hulu	34,01	426,87	188,69	1.810,74	7.836,98
3.	Indragiri Hilir	472,98	77,07	550,91	839.701,35	1.189.790,85
4.	Pelalawan	252,98	55,81	1.139,68	7728125,81	864.924,96
5.	Siak	1.329,11	2.896,99	534,56	9.372.122,26	4.997.481,35
6.	Kampar	218,34	122,83	9.906,81	492.446,38	3.078.126,71
7.	Rokan Hulu	373,03	83,41	291,2	459.551,04	111.134,87
8.	Bengkalis	261,78	28,53	128,8	5.109,23	8.622.922,59
9.	RokanHilir	2,86	11,78	63,39	98.925,95	8.764,28
10.	Kepulauan Meranti	1.328,09	2.677,24	4.533,05	14.249,16	109.721,21
11.	Pekanbaru	1.805,11	1.882,46	1.789,64	116.561,3	4.398.107,78
12.	Dumai	1,88	25,4	0,69	14413,42	47987,7

Sumber: BPS Provinsi Riau (2018)

Berdasarkan Tabel 4.5 diatas dapat dilihat angka realisasi investasi PMDN/PMA Provinsi Riau pada tahun 2013-2017. Dari tabel 4.5 diatas bisa dilihat angka realisasi investasi PMDN/PMA yang berada di provinsi Riau selalu berubah setiap tahun nya. Pada tahun 2013 angka realisasi investasi PMDN/PMA yang berada di kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 99,05 milyar rupiah pada tahun 2014 mengalami kenaikan angka realisasi investasi PMDN/PMA menjadi 798,72 milyar rupiah pada tahun 2015 mengalami penurunan angka realisasi investasi PMDN/PMA menjadi 269,05 milyar rupiah pada tahun 2016 mengalami kenaikan kembali angka realisasi investasi PMDN/PMA kembali menjadi 1681912,94 milyar rupiah, ditahun 2017 mengalami kenaikan angka realisasi investasi PMDN/PMA sebesar 33912,99 milyar rupiah.

Pada tahun 2013 Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 34,01 milyar rupiah pada tahun 2014 mengalami kenaikan angka realisasi investasi PMDN/PMA menjadi 426,87 milyar rupiah pada tahun 2015 mengalami penurunan angka realisasi investasi PMDN/PMA menjadi 188,69 milyar rupiah pada tahun 2016 mengalami kenaikan kembali angka realisasi investasi PMDN/PMA kembali menjadi 1.810,74 milyar rupiah, ditahun 2017 mengalami kenaikan angka realisasi investasi PMDN/PMA sebesar 7.836,98 milyar rupiah.

Tahun 2013 angka realisasi investasi PMDN/PMA yang berada di kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 472,98 milyar rupiah pada tahun 2014 mengalami penurunan angka realisasi investasi PMDN/PMA menjadi 77,07 milyar rupiah pada tahun 2015 mengalami kenaikan angka realisasi

investasi PMDN/PMA menjadi 550,91 miliar rupiah pada tahun 2016 mengalami kenaikan kembali angka realisasi investasi PMDN/PMA kembali menjadi 839.701,35 miliar rupiah, ditahun 2017 mengalami kenaikan angka realisasi investasi PMDN/PMA sebesar 1.189.790,85 miliar rupiah.

Tahun 2013 angka realisasi investasi PMDN/PMA yang berada di kabupaten Pelalawan sebanyak 252,98 miliar rupiah pada tahun 2014 mengalami penurunan angka realisasi investasi PMDN/PMA menjadi 55,81 miliar rupiah pada tahun 2015 mengalami kenaikan angka realisasi investasi PMDN/PMA menjadi 1.139,68 miliar rupiah pada tahun 2016 mengalami kenaikan kembali angka realisasi investasi PMDN/PMA kembali menjadi 7728125,81 miliar rupiah, ditahun 2017 mengalami penurunan angka realisasi investasi PMDN/PMA sebesar 864.924,96 miliar rupiah.

Tahun 2013 angka realisasi investasi PMDN/PMA yang berada di kabupaten Siak sebanyak 1329,11 miliar rupiah pada tahun 2014 mengalami kenaikan angka realisasi investasi PMDN/PMA menjadi 2.896,99 miliar rupiah pada tahun 2015 mengalami penurunan angka realisasi investasi PMDN/PMA menjadi 534,56 miliar rupiah pada tahun 2016 mengalami kenaikan kembali angka realisasi investasi PMDN/PMA kembali menjadi 9.372.122,26 miliar rupiah, ditahun 2017 mengalami penurunan angka realisasi investasi PMDN/PMA sebesar 4.997.481,35 miliar rupiah.

Tahun 2013 angka realisasi investasi PMDN/PMA yang berada di kabupaten Kampar sebanyak 218,34 milyar rupiah pada tahun 2014 mengalami penurunan angka realisasi investasi PMDN/PMA menjadi 122,83 milyar rupiah pada tahun 2015 mengalami kenaikan angka realisasi investasi PMDN/PMA menjadi 9.906,81 milyar rupiah pada tahun 2016 mengalami kenaikan kembali angka realisasi investasi PMDN/PMA kembali menjadi 492.446,38 milyar rupiah, ditahun 2017 mengalami penurunan angka realisasi investasi PMDN/PMA sebesar 3.078.126,71 milyar rupiah.

Tahun 2013 angka realisasi investasi PMDN/PMA yang berada di kabupaten Rokan Hulu sebanyak 373,03 milyar rupiah pada tahun 2014 mengalami penurunan angka realisasi investasi PMDN/PMA menjadi 83,41 milyar rupiah pada tahun 2015 mengalami kenaikan angka realisasi investasi PMDN/PMA menjadi 291,2 milyar rupiah pada tahun 2016 mengalami kenaikan kembali angka realisasi investasi PMDN/PMA kembali menjadi 459.551,04 milyar rupiah, ditahun 2017 mengalami penurunan angka realisasi investasi PMDN/PMA sebesar 111.134,87 milyar rupiah.

Tahun 2013 angka realisasi investasi PMDN/PMA yang berada di kabupaten Bengkalis sebanyak 261,78 milyar rupiah pada tahun 2014 mengalami penurunan angka realisasi investasi PMDN/PMA menjadi 28,53 milyar rupiah pada tahun 2015 mengalami kenaikan angka realisasi investasi PMDN/PMA menjadi 128,8 milyar rupiah pada tahun 2016

mengalami kenaikan kembali angka realisasi investasi PMDN/PMA kembali menjadi 5.109,23 milyar rupiah, ditahun 2017 mengalami kenaikan angka realisasi investasi PMDN/PMA sebesar 8.622.922,59 milyar rupiah.

Tahun 2013 angka realisasi investasi PMDN/PMA yang berada di kabupaten Rokan Hilir sebanyak 2,86 milyar rupiah pada tahun 2014 mengalami penurunan angka realisasi investasi PMDN/PMA menjadi 11,78 milyar rupiah pada tahun 2015 mengalami kenaikan angka realisasi investasi PMDN/PMA menjadi 63,39 milyar rupiah pada tahun 2016 mengalami kenaikan kembali angka realisasi investasi PMDN/PMA kembali menjadi 98.925,95 milyar rupiah, ditahun 2017 mengalami penurunan angka realisasi investasi PMDN/PMA sebesar 8.764,28 milyar rupiah.

Tahun 2013 angka realisasi investasi PMDN/PMA yang berada di kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 1.328,09 milyar rupiah pada tahun 2014 mengalami kenaikan angka realisasi investasi PMDN/PMA menjadi 2.677,24 milyar rupiah pada tahun 2015 mengalami kenaikan angka realisasi investasi PMDN/PMA menjadi 4.533,05 milyar rupiah pada tahun 2016 mengalami kenaikan kembali angka realisasi investasi PMDN/PMA kembali menjadi 14.249,16 milyar rupiah, ditahun 2017 mengalami penurunan angka realisasi investasi PMDN/PMA sebesar 109.721,21 milyar rupiah.

Tahun 2013 angka realisasi investasi PMDN/PMA yang berada di Kota Pekanbaru sebanyak 1.805,11 milyar rupiah pada tahun 2014 mengalami kenaikan angka realisasi investasi PMDN/PMA menjadi 1.882,46 milyar rupiah pada tahun 2015 mengalami kenaikan angka realisasi investasi PMDN/PMA menjadi 1.789,64 milyar rupiah pada tahun 2016 mengalami kenaikan kembali angka realisasi investasi PMDN/PMA kembali menjadi 116.561,3 milyar rupiah, ditahun 2017 mengalami kenaikan angka realisasi investasi PMDN/PMA sebesar 4.398.107,78 milyar rupiah.

Tahun 2013 angka realisasi investasi PMDN/PMA yang berada di Kota Dumai sebanyak 1,88 milyar rupiah pada tahun 2014 mengalami kenaikan angka realisasi investasi PMDN/PMA menjadi 25,4 milyar rupiah pada tahun 2015 mengalami penurunan angka realisasi investasi PMDN/PMA menjadi 0,69 milyar rupiah pada tahun 2016 mengalami kenaikan kembali angka realisasi investasi PMDN/PMA kembali menjadi 14.413,42 milyar rupiah, ditahun 2017 mengalami penurunan angka realisasi investasi PMDN/PMA sebesar 47.987,8 milyar rupiah.